

B u l e t i n



PARLEMENTARIA



Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju

KETUA
Perluas
Kerja Sama
Internasional

KORPOLKAM
Rumuskan
Kebijakan
Zero ODOL

PSN Migas Rampung Sesuai Target



Nomor 1356/III/VIII/2025 Agustus 2025



9 772614 339005



PSN Migas Rampung Sesuai Target



FOTO: UM/AHA

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri saat agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke PT Kilang Pertamina Balikpapan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (12/8/2025).

Meski pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada triwulan II 2025 tercatat positif sebesar 4,96 persen, sejumlah sektor kunci seperti pertambangan dan konstruksi justru mengalami kontraksi. Kondisi ini menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri yang

menekankan pentingnya Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Kalimantan Timur selesai sesuai target agar segera memberikan dampak riil bagi masyarakat.

“Keberhasilan proyek strategis tidak hanya ditentukan oleh nilai investasinya, tetapi oleh dampaknya terhadap sektor riil dan masyarakat luas,” ujar Hanif saat membuka

agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke PT Kilang Pertamina Balikpapan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (12/8).

Sejumlah proyek besar seperti pembangunan infrastruktur konektivitas, kawasan industri hijau, dan fasilitas energi, khususnya *Refinery Development Master Plan* (RDMP) Balikpapan yang kini tengah dibangun di Provinsi Kalimantan Timur. Per 10 Juli 2025, progres fisik RDMP telah mencapai 95,73 persen. Kemudian, RDMP Balikpapan diperkirakan menyerap sekitar 24.000 tenaga kerja selama proyek berlangsung.

Sebab itu, Hanif menekankan, investasi yang masuk melalui PSN harus mendorong produktivitas, memperluas peluang usaha bagi pelaku UMKM, serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Ia menegaskan dampak dari pembangunan harus dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk dalam peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kualitas lingkungan hidup.

“Kami memandang penting agar kebijakan fiskal yang dijalankan tepat sasaran, efisien, dan berkeadilan demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata di Kalimantan Timur,” ujar Politisi Fraksi PKB itu.

—um/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya



Perluas Kerja Sama Internasional



FOTO: DOK/PDT

Ketua DPR RI Puan Maharani.

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan Presiden Republik Peru, Dina Ercilia Boluarte Zagarra, di Ruang VVIP Gedung Nusantara DPR RI, Senin (11/8). Dalam pertemuan tersebut, Puan menegaskan bahwa DPR RI akan selalu mendukung upaya Presiden Republik Indonesia untuk mengembangkan dan memperluas kerja sama internasional, termasuk dengan Peru, demi kepentingan rakyat.

Kunjungan Presiden Peru ini berlangsung dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Peru sekaligus menjadi kunjungan balasan atas lawatan Presiden RI ke Peru tahun lalu. Menurut Puan, di tengah ketidakpastian global, peningkatan kerja sama dengan negara-negara seperti Peru menjadi relevan dan strategis.

“Kita harus membangun kerja sama dengan negara-negara yang mengedepankan multilateralisme dan menolak unilateralisme. Peru adalah mitra penting Indonesia di

Amerika Latin karena memiliki banyak kesamaan, seperti garis pantai yang panjang, kekayaan budaya, dan sumber daya alam,” ujarnya kepada awak media.

Sebagai sesama pemimpin perempuan, Puan juga menyampaikan dukungan agar para pemimpin perempuan di kedua negara dapat menjalankan kepemimpinan secara optimal. Ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memperkuat diplomasi antar-pemerintah, termasuk hubungan antar-masyarakat (*people to people contact*).

Pada kesempatan itu, Puan menyambut baik penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (IPSEPA) antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Dina Boluarte yang dilakukan di waktu pagi hari sebelum pertemuan ini berlangsung. Ia berharap perjanjian tersebut dapat meningkatkan kerja sama Indonesia dengan Peru di berbagai sektor. **hal/rdn**



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH

Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

M. Ibnukhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindy, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)

Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Prima Danutirto, A.Md.

Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom., Hira Askamal, S.I.Kom., Bianca Destianti, S.I.Kom., Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom., Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom., Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom., Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Purinho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien, Yasmin Nabila

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Rumi Sari Budisti, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moernoponi, Azka Restu Afidhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulla, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrezi, Aan Risdiana, M.Kom.

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom., Savant Rifqi Hidayat, S.E., Indah Ekawati, S.I.Kom.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

Adi Ardiansyah, M.M.

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



DPR bersama pemerintah dan Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, sepakat membentuk tim bersama untuk merumuskan kebijakan Zero ODOL di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Rumuskan Kebijakan Zero ODOL

DPR RI bersama pemerintah dan Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara sepakat membentuk tim bersama untuk merumuskan kebijakan Zero 'Over Dimension Over Loading' (ODOL) yang rencananya akan diberlakukan secara penuh mulai tahun 2027. Kesepakatan ini tercapai dalam rapat lintas sektor yang digelar di Kompleks Parlemen, Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (4/8).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan

bahwa pembentukan tim teknis ini bertujuan untuk menampung aspirasi semua pihak dan menyusun tahapan implementasi kebijakan zero ODOL secara bertahap dan terukur. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjamin keselamatan lalu lintas serta menjaga infrastruktur jalan dari kerusakan akibat beban berlebih.

"Tadi disampaikan oleh Mensesneg bahwa Presiden memperhatikan dengan cermat mengenai masalah over dimensi dan *overload*. Kami di DPR berperan sebagai fasilitator agar dalam proses transisi ini tidak ada pihak

yang dirugikan," ujar Dasco dalam konferensi pers.

Dalam rapat tersebut hadir pula Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta perwakilan pengemudi dari Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara.

Menhub Dudy menyatakan dukungan penuh terhadap langkah DPR dalam menjembatani dialog antara pemerintah dan pengemudi logistik. Ia menyebut, tim bersama ini akan mengkaji berbagai aspek teknis seperti kapasitas kendaraan, standar angkutan barang, regulasi perizinan, serta proses edukasi dan sosialisasi kepada para pelaku industri transportasi.

Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Pengemudi Independen (API), Suroso, menyatakan bahwa para pengemudi logistik siap mendukung penuh implementasi kebijakan Zero ODOL demi kepastian hukum dan keselamatan berkendara. **ssb/aha**



Penguatan Kamtibmas Diapresiasi

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi langkah inovatif Polsek Ciparay, Kabupaten Bandung, yang memanfaatkan teknologi informasi melalui jaringan CCTV atau “mata digital” untuk memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurutnya, terobosan ini patut dicontoh oleh seluruh Polsek di Indonesia.

“Inilah yang dilakukan Polsek Ciparay di bawah pimpinan Pak Kapolsek Ilmansyah. Mereka

berhasil menciptakan situasi kamtibmas yang lebih terpantau melalui pemanfaatan teknologi informasi. Saya ingin semua Polsek di Indonesia bisa melakukan terobosan seperti ini demi memastikan masyarakat aman, nyaman, dan tertib,” ujar Cucun usai meresmikan *Command Center* Polsek Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (8/8).

Cucun menyebutkan bahwa sejumlah wilayah di Polresta Bandung telah mengembangkan inovasi serupa. Misalnya, Polsek Majalaya dengan program “Majalaya Awas” yang

memungkinkan pemantauan wilayah melalui CCTV, serta Polsek Ciparay dengan konsep “Bengras” yang dalam bahasa Sunda berarti melihat dengan jelas.

“Nanti akan muncul lagi Polsek-Polsek di kecamatan lain yang menerapkan program seperti ini. Saya bangga dan siap mendukung penuh,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemanfaatan CCTV secara masif di seluruh wilayah hukum Polresta Bandung akan membantu aparat dalam menjaga keamanan, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat. — **ais/aha**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal usai meresmikan Command Center Polsek Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (8/8/2025).

Bangka Belitung Wilayah Strategis Pertahanan Nasional



Anggota Komisi I DPR RI Rudianto Tjen saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi I DPR RI ke Korem 045/Garuda Jaya, Pangkal Pinang, Selasa (12/8/2025).

Anggota Komisi I DPR RI Rudianto Tjen menegaskan bahwa secara geografis, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memiliki posisi strategis sebagai garis pertahanan terdepan Indonesia di wilayah barat. Babel dinilai sebagai “penghadang” pertama apabila terjadi serangan dari luar, terutama dari arah Singapura, Malaysia, dan negara-negara Asia lainnya menuju Pulau Jawa.

“Karena itu saya sangat menyarankan agar kita membangun

pangkalan udara yang kuat di sini. Sebelum ada serangan menuju Pulau Jawa, Bangka Belitung sudah siap untuk menghadangnya,” ujar Rudianto saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi I DPR RI ke Korem 045/Garuda Jaya, Pangkal Pinang, Selasa (12/8).

Selain itu, Rudianto juga mendukung wacana peningkatan status Korem 045/Garuda Jaya menjadi Komando Daerah Militer (Kodam). Menurutnya, keberadaan Kodam di Babel akan memberikan keuntungan strategis, mengingat wilayah ini berdekatan dengan

banyak provinsi di Sumatera.

“Kalau seandainya terjadi sesuatu yang darurat, pengiriman pasukan dari Bangka Belitung ke daerah-daerah yang memerlukan akan lebih cepat. Ini strategis dan dekat,” jelas legislator dapil Babel tersebut.

Kunjungan kerja ini menjadi momentum bagi Komisi I untuk melihat langsung kesiapan TNI di daerah, sekaligus memperjuangkan peningkatan fasilitas pertahanan yang memadai di Bangka Belitung.

aha



Tak Kompromi Soal Penamaan Laut Ambalat

Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh menyatakan penolakan keras dan meminta Pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas menentang penyebutan nama “Laut Sulawesi” oleh Pemerintah Malaysia.

Pernyataan ini disampaikan Oleh sebagai respons atas sikap Malaysia yang tidak akan menggunakan istilah “Laut Ambalat”. Padahal, penyebutan itu sebagaimana lazimnya digunakan Indonesia untuk merujuk pada kawasan maritim yang masih disengketakan di perairan timur Kalimantan.

“Saya menolak keras dan meminta pada pemerintah untuk

tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh Malaysia karena substansinya adalah bahwa penamaan itu akan memiliki arti dan memiliki makna. Artinya Sulawesi maknanya akan menjadi seluruh wilayah perairan Sulawesi, pemerintah tidak boleh berkompromi terhadap penamaan ini,” tegas Oleh Soleh kepada **Parlementaria** di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi I DPR RI di kota Padang, provinsi Sumatera Barat, Senin (11/8).

Ia juga menekankan bahwa setiap jengkal wilayah Indonesia, bahkan hingga satu senti pun, tidak boleh lepas dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Pemerintah harus ambil sikap melawan dan tidak boleh ada kompromi terhadap penyebutan namanya,” tandas Oleh. —tra/rdn

Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi I DPR RI di kota Padang, provinsi Sumatera Barat, Senin (11/8/2025).

Saya menolak keras dan meminta pada pemerintah untuk tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh Malaysia karena substansinya adalah bahwa penamaan itu akan memiliki arti dan memiliki makna. Artinya Sulawesi maknanya akan menjadi seluruh wilayah perairan Sulawesi, pemerintah tidak boleh berkompromi terhadap penamaan ini



FOTO: TRA/PDT



Sinergi Berantas Narkoba dan Karhutla

Anggota Komisi I DPR RI Elita Budiati mendorong jajaran Komando Resor Militer (KOREM) 042/Garuda Putih Jambi bersinergi dengan para pemangku kepentingan lainnya untuk ikut aktif dalam perang memberantas peredaran narkoba dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terutama di Provinsi Jambi. Demikian diungkapkan Elita usai melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI dengan

Danrem 042/Garuda Putih dan jajarannya, Senin (11/8).

“Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), diatur tugas pokok TNI yang meliputi penegakan kedaulatan negara, pemeliharaan keutuhan wilayah, dan perlindungan terhadap seluruh rakyat. Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa TNI juga memiliki peran dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang mencakup dukungan terhadap tugas pemerintah daerah serta kerjasama dengan kepolisian dalam rangka menjaga keamanan

dan ketertiban masyarakat,” urai Elita Budiati.

Legislator asal Dapil Jawa Barat IX ini juga mendorong koordinasi dari Babinkamtibmas (Polda) dengan Babinsa (KOREM) dalam memberikan perhatian kesiapsiagaan terkait memberantas peredaran narkoba di wilayah Provinsi Jambi.

Pada kesempatan tersebut, Danrem 042/Garuda Putih Brigjen TNI Heri Purwanto menjelaskan pihaknya sedang gencar melakukan sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

“Kami menjalankan program internal untuk mencegah peredaran narkoba di kalangan prajurit TNI KOREM 042/Garuda Putih melalui pemeriksaan dengan pengecekan Urine anggota Korem sebagai langkah-langkah preventif lainnya sesuai prosedur P4GN,” tukasnya.

ojo/aha



FOTO: OJO/PDT



Scan QR
untuk berita
selengkapnya

Anggota Komisi I DPR RI Elita Budiati saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI dengan Danrem 042/Garuda Putih dan jajarannya, Senin (11/8/2025).



Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Haryadi saat memimpin kunjungan kerja dalam rangka panen raya di Kabupaten Maros, Selasa (12/8/2025).

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Haryadi menegaskan bahwa Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Maros, memegang peran strategis sebagai sentra produksi beras nasional dengan produktivitas mencapai 9 ton per hektar dan panen hingga tiga kali setahun.

“Ini harus kita jaga dan tingkatkan. Semua kebutuhan petani sudah kami catat, mulai dari *combine harvester*, traktor roda empat, pompa, hingga sumur dalam. Insyaallah traktor akan sampai minggu depan,” ujarnya dalam kunjungan kerja dalam rangka panen raya di Kabupaten Maros, Selasa (12/8).

Ia menambahkan bahwa sektor pertanian membutuhkan sinergi semua pihak untuk mengatasi tantangan cuaca, ketersediaan sarana produksi, dan infrastruktur irigasi. “Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Mari gunakan momentum panen

Maros Sentra Produksi Beras Nasional

raya ini sebagai titik tolak menuju produksi padi yang semakin meningkat, petani semakin sejahtera, dan kemandirian beras yang berkelanjutan,” kata Titiek.

Dalam kunjungan tersebut, Kementerian Pertanian menyerahkan bantuan benih padi senilai Rp420 juta untuk Pemkab Maros, serta benih jagung senilai Rp900 juta yang akan disalurkan pada musim tanam Oktober 2025.

Lebih lanjut Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menyampaikan bahwa produksi padi Sulsel pada Januari–Agustus 2025 mencapai 3,34 juta ton gabah

kering giling (GKG) atau setara 1,92 juta ton beras, dengan surplus 1,21 juta ton setelah kebutuhan konsumsi domestik. Fatmawati menilai pencapaian surplus tersebut merupakan bukti kolaborasi yang solid.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan dialog bersama petani setempat yang mengemukakan sejumlah kebutuhan seperti pompanisasi, traktor roda empat, sumur dalam, dan kemasan pupuk lebih kecil agar mudah diangkut. Semua masukan dicatat untuk ditindaklanjuti kementerian terkait. **tn/aha**



Perkuat Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, menyampaikan bahwa pupuk merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian maupun budi daya ikan

menegaskan pentingnya untuk melakukan penguatan tata kelola produksi dan distribusi pupuk bersubsidi. “Persoalan yang sering muncul selama ini justru di sisi distribusi, khususnya untuk pupuk bersubsidi,” jelas Panggah saat melakukan Kunjungan Kerja Reses ke PT Pupuk Kalimantan Timur

pemerintah dan DPR. “Dengan pengaturan yang lebih sederhana, pemantauan pelaksanaan distribusi akan lebih mudah dan terukur,” imbuhnya.

Panggah juga menyoroti peran strategis PT Pupuk Kaltim yang telah berkembang menjadi industri pupuk besar dengan sumber daya manusia dan infrastruktur yang mumpuni. Menurutnya, kapasitas dan pengalaman yang dimiliki PKT dapat diperluas menjadi basis pengembangan industri kimia nasional.

Politisi dari Fraksi Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa



FOTO: ICA/PDT

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto saat melakukan Kunjungan Kerja Reses ke PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), Kota Bontang, Kalimantan Timur, Selasa (12/8/2025).

nasional. Program pupuk bersubsidi hadir untuk memastikan petani mendapatkan pupuk berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus mendukung ketahanan pangan, menekan biaya produksi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, Panggah

(PKT), Kota Bontang, Kalimantan Timur, Selasa (12/8).

Ia menilai, kebijakan baru yang memusatkan tanggung jawab pengadaan dan distribusi pada Kementerian Pertanian (Kementan) dan PT Pupuk Indonesia akan memudahkan pengawasan oleh

dukungan DPR terhadap PT Pupuk Kaltim tidak sebatas pada produksi pupuk. “Kalau hanya pupuk, variasi produknya terbatas dan bisnisnya sempit. Kalau dikembangkan menjadi basis industri kimia, manfaatnya jauh lebih besar bagi negara,” ujarnya. **ica/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Ketidaksesuaian Program Gizi Nasional di Lapangan



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh saat melakukan kunjungan kerja ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Gorontalo, , Senin (11/8/2025).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mengungkapkan temuan penting saat melakukan kunjungan kerja ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Gorontalo. Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah adanya perbedaan signifikan antara laporan yang disampaikan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rapat resmi di Jakarta dengan implementasi program di lapangan.

Menurut Ninik, dalam rapat kerja, BGN memaparkan bahwa menu untuk anak sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan ibu hamil dirancang berbeda. Perbedaan

itu meliputi jenis lauk, kandungan gizi, serta komposisi menu yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok. "Namun yang kami lihat di lapangan justru instruksinya sama, hanya porsi dan teksturnya saja yang berbeda," ujarnya saat kunjungan, Senin (11/8).

Ia menjelaskan, perbedaan menu seharusnya menjadi bagian penting dari strategi pemenuhan gizi. Anak-anak sekolah dasar, misalnya, membutuhkan porsi dan jenis makanan yang berbeda dengan remaja SMA atau ibu hamil. Jika perbedaan itu tidak diterapkan, maka tujuan gizi yang tepat sasaran bisa meleset.

Temuan ini memunculkan kekhawatiran bahwa ada celah

koordinasi antara perencanaan pusat dan pelaksanaan daerah. Ia menilai, penting untuk memastikan bahwa instruksi teknis benar-benar diterima, dipahami, dan dilaksanakan oleh pengelola dapur di setiap daerah.

Lebih lanjut, Ninik menegaskan bahwa DPR RI memiliki peran untuk memastikan anggaran yang digelontorkan negara digunakan secara efektif. Ia berharap BGN segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk memperbaiki alur koordinasi, agar perencanaan gizi nasional tidak hanya indah di atas kertas, tetapi benar-benar terimplementasi dengan baik di lapangan.

gys/aha



Scan QR
untuk berita
selengkapnya

Pemerataan Tenaga Dokter Spesialis

Anggota Komisi IX DPR RI Muh. Haris menegaskan pentingnya percepatan pemerataan tenaga medis, khususnya dokter spesialis, di Provinsi Maluku Utara dan kawasan timur Indonesia. Menurutnya, salah satu tantangan besar di Maluku Utara adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan prasarana kesehatan.

"Kalau membangun fisik rumah sakit itu relatif lebih mudah. Tetapi kalau fasilitasnya sudah ada, namun tenaga medis terutama dokter spesialis tidak tersedia, maka pelayanan tetap tidak optimal," tegas Muh. Haris kepada **Parlementaria** disela pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan Gubernur Maluku Utara beserta jajaran organisasi perangkat daerah dan mitra kerja, Senin (11/8).

Oleh karena itu, Legislator Fraksi PKS ini mendorong pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan untuk memprioritaskan program pendidikan dan penempatan dokter spesialis di Maluku Utara. Muh. Haris menekankan pentingnya

pemberian beasiswa bagi putra-putri daerah agar dapat menempuh pendidikan spesialis, sekaligus memastikan mereka kembali mengabdikan di wilayah asal.

Selain itu, ia juga menyoroti perlunya skema insentif khusus bagi tenaga medis yang bertugas di daerah terpencil atau jauh dari pusat kota. "Kalau nominal tunjangan sama dengan di kota

besar di Jawa, tentu mereka akan memilih tinggal di sana. Harus ada komitmen insentif yang lebih tinggi untuk menarik mereka berkarir dan mengabdikan diri di Maluku Utara," tandas Muh. Haris.

Lebih lanjut, Muh. Haris berharap dengan pemerataan tenaga medis dan peningkatan fasilitas kesehatan, masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar atau menempuh perjalanan jauh ke luar daerah untuk mendapatkan layanan spesialis. Langkah ini diyakini tidak hanya akan memperkuat layanan kesehatan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan timur Indonesia. — **pun/aha**

Anggota Komisi IX DPR RI Muh. Haris disela pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan Gubernur Maluku Utara beserta jajaran organisasi perangkat daerah dan mitra kerja, Senin (11/8/2025).



FOTO: PUN/PDT

Penutupan Jalur Ilegal PMI Asal NTT

Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama menyoroti kondisi pekerja migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sebagian besar bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Berdasarkan data 2022, terdapat sekitar 1.403 PMI asal NTT, dengan 90–95 persen penempatan di Malaysia, sisanya di Singapura dan Hong Kong.

Menurut Ade, peluang penempatan PMI asal NTT di luar negeri seharusnya bisa dua hingga tiga kali lipat lebih besar. Hal itu jika sumber daya manusia dibekali keterampilan bahasa asing yang memadai.

“Kami mendorong penambahan kurikulum bahasa asing dengan jam belajar yang lebih banyak, agar generasi kita bisa mendapatkan porsi penempatan yang lebih besar,”

ujar Ade kepada *Parlementaria* dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IX di Kupang, NTT, Senin (11/8).

Ia juga mengungkapkan kekhawatiran atas tingginya jumlah PMI non-prosedural yang dikirim melalui jalur ilegal, seperti jalur tikus lewat Batam, sebelum diterbangkan ke negara tujuan. Menurutnya, kondisi ini meningkatkan risiko

kekerasan fisik dan mental, serta membuat pemerintah kesulitan melakukan perlindungan karena tidak adanya data resmi.

“Kami meminta Pemerintah Provinsi NTT menutup celah jalur ilegal dan mengedukasi masyarakat untuk mengikuti prosedur resmi. PMI yang berangkat secara prosedural biasanya memiliki risiko yang jauh lebih kecil terhadap kekerasan dan pelanggaran hak,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Menanggapi hal ini, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengakui bahwa dari sekitar 2.000 PMI resmi yang berangkat tiap tahun, jumlah yang tidak resmi cukup banyak, dan hampir semua kasus kematian PMI berasal dari jalur non-prosedural.

“Kami mulai melakukan edukasi sejak tingkat desa, memastikan calon PMI memiliki keterampilan, pengetahuan bahasa, budaya, dan mengikuti prosedur resmi,” kata Melky.

— gal/rdn

Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IX di Kupang, NTT, Senin (11/8/2025).



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO: GAL/PDT

Jangan Sampai Hambat Pertumbuhan Daerah

Efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah RI di tahun 2025 sedikit banyak berdampak pada geliat perekonomian di daerah. Seperti yang ditemui oleh Komisi XI DPR RI dalam Kunjungan Kerja Reses (Kunres) ke Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Dalam Kunres yang dihadiri para Bupati di Sulsel tersebut, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro mengungkapkan bahwa para Bupati mengeluhkan efisiensi yang dilakukan pada tahun 2025 yang ikut memotong Transfer

Ke Daerah. Diketahui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 merinci pemangkasan TKD senilai Rp50,59 triliun.

"Di tahun 2025 ini terjadi efisiensi anggaran kurang lebih 50 triliun. Ini bagi kepala-kepala daerah itu mengalami yang namanya stagnasi pertumbuhan ekonomi

karena geliat pembangunan itu tidak ada sama sekali," ujarnya usai agenda Kunres, Senin (11/08).

Selanjutnya Fauzi mengungkapkan, di tahun 2026, Kementerian Keuangan akan mengupayakan semaksimal mungkin efisiensi anggaran tidak akan lagi memotong dana transfer pusat ke daerah seperti di tahun 2025.

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan telah mengumumkan akan kembali melakukan efisiensi pada anggaran tahun 2026. Setidaknya, ada 15 item anggaran belanja barang dan modal yang dipangkas melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Efisiensi ini kata Amro akan dicermati dengan baik oleh Komisi XI. Selain itu, aspirasi yang telah diserap dalam Kunres ke Kota Makassar akan dibawa dalam rapat Komisi XI soal anggaran bersama

Kementerian Keuangan akan mengupayakan semaksimal mungkin efisiensi anggaran tidak akan lagi memotong dana transfer pusat ke daerah seperti di tahun 2025.

Kementerian Keuangan.

"Aspirasi dari daerah menjadi atensi khusus bagi Kementerian Keuangan untuk melakukan akselerasi supaya pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah akan bergeliat konsumsi dengan daya beli dengan tidak dipotongnya dana transfer daerah," ucapnya. **ndn/aha**

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro dalam Kunjungan Kerja Reses (Kunres) ke Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (11/08/2025).

Scan QR untuk berita selengkapnya



KEK Nongsa Jadi Pusat Ekonomi Digital



Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan saat melakukan peninjauan lapangan ke Nongsa Digital Park, di Wilayah KEK Nongsa, Batam, Kepulauan Riau, Selasa (12/8/2025).

Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan, menegaskan dukungan penuh terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa di Batam, Kepulauan Riau, yang berfokus pada sektor ekonomi kreatif, khususnya ekonomi digital.

Marwan menilai KEK Nongsa memiliki potensi besar menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia, di luar sektor-sektor konvensional yang selama ini menjadi andalan.

“Program ini bisa membuka lapangan kerja baru, menciptakan sumber penerimaan negara baru,

dan mendorong investasi. Memang butuh waktu dan investasi besar, tapi ini langkah penting,” ujar Marwan usai melakukan peninjauan lapangan ke Nongsa Digital Park, di Wilayah KEK Nongsa, Batam, Kepulauan Riau, Selasa (12/8).

Ia juga menyoroti posisi strategis KEK Nongsa yang berdekatan dengan Singapura dan Johor, Malaysia. Menurutnya, pengembangan kawasan ini harus menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk bersaing di kancah ekonomi digital regional.

Marwan mengungkapkan, salah satu harapan pelaku usaha di KEK Nongsa adalah percepatan

pembangunan pusat investasi internasional oleh Kementerian Informasi Digital. “Ini akan menjadi katalis yang membangun kepercayaan investor bahwa pemerintah serius mendukung kawasan ini,” katanya.

Sebagai mitra Kementerian Keuangan, Komisi XI DPR berkomitmen mendukung langkah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memfasilitasi pengembangan KEK Nongsa, termasuk melalui kebijakan yang mendorong kelancaran arus barang dan investasi. “Kita akan melihat audiensi dan ketersediaan APBN untuk merealisasikan harapan ini,” tutupnya. **qq/aha**



Keamanan Terminal LNG Benoa

Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Bali, Senin (11/8), untuk meninjau infrastruktur energi strategis, termasuk Terminal LNG Benoa yang dioperasikan PT Pelindo Energi Logistik. Tinjauan ini menjadi bagian dari upaya Komisi XII memastikan proyek energi di daerah berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan dan standar keselamatan.

Anggota Komisi XII DPR RI, Zulfikar Hamonangan, menilai lokasi Terminal LNG Benoa memiliki potensi besar untuk pengembangan ke depan. "Saya melihat kondisi tempat yang ada itu sangat mendukung bagi saya untuk dilaksanakannya pengembangan. Namun ada beberapa aspek, aspek sosial dan juga persoalan lingkungan yang perlu menjadi perhatian," ujarnya.

Zulfikar menekankan pentingnya memperhatikan masukan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan pihak terkait dalam penyusunan rencana tata letak fasilitas. "Kita perlu meminta perubahan *set plan* tentang tata letak yang sesuai dengan masukan Kementerian Lingkungan Hidup. Jangan sampai konsepnya hanya sebatas gambar yang kita lihat tadi, tetapi rekomendasi lingkungan belum diakomodasi," katanya.

Selain itu, ia menyoroti aspek keamanan fasilitas LNG yang dinilai belum optimal. LNG (*Liquefied Natural Gas*) memiliki risiko tinggi karena sifatnya yang mudah menguap pada tekanan rendah dan dapat memicu ledakan

bila terjadi kebocoran. Zulfikar membandingkan pengelolaan

Kita perlu meminta perubahan set plan tentang tata letak yang sesuai dengan masukan Kementerian Lingkungan Hidup. Jangan sampai konsepnya hanya sebatas gambar yang kita lihat tadi, tetapi rekomendasi lingkungan belum diakomodasi

Anggota Komisi XII DPR RI, Zulfikar Hamonangan saat melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Bali, Senin (11/8/2025).



fasilitas LNG di Singapura yang memisahkan jalur pipa dari area lalu lintas manusia.

"Kalau di sana, pipa dengan jalur manusia itu dipisahkan. Kalau di sini, jujur saya agak khawatir. Namanya manusia kita tidak tahu apesnya, pas kita di situ bisa saja terjadi sesuatu," ujarnya.

Terminal LNG Benoa sendiri memiliki kapasitas penyimpanan sekitar 26.000 m³ dan fasilitas regasifikasi hingga 50 MMSCFD. Infrastruktur ini mendukung pasokan energi bersih bagi pembangkit listrik, sektor transportasi, dan industri perhotelan di Bali. —ssb/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



Ideal Jadi Pusat Tenaga Surya Nasional



Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, saat kunjungan kerja ke PLTS Oelpuah, Kupang, Senin (11/8/2025).

Komisi XII DPR RI menilai Nusa Tenggara Timur (NTT) sangat cocok untuk menjadi pusat pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berskala besar. Hal ini didukung oleh kondisi alam yang ideal serta ketersediaan lahan tidak produktif yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan energi terbarukan.

“Daerah NTT ini sangat bagus untuk PLTS, karena curah mataharnya sangat bagus dan curah hujannya sangat rendah. Jadi sangat ideal untuk PLTS. NTT ini juga sangat bagus untuk *solar farm* karena banyak lahan-lahan yang tidak produktif, tidak bisa diapa-apakan,” ujar Wakil Ketua Komisi

XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, saat kunjungan kerja ke PLTS Oelpuah, Kupang, Senin (11/8).

Solar farm sendiri adalah area luas yang dipenuhi panel-panel surya yang tersusun secara sistematis untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik dalam skala besar. Listrik yang dihasilkan biasanya dialirkan ke jaringan listrik nasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun industri.

Sugeng menambahkan, konsumsi listrik per kapita Indonesia saat ini baru mencapai 1.300 kWh, jauh di bawah rata-rata negara-negara ASEAN. Karena itu, NTT direncanakan akan dikembangkan menjadi pusat

solar farm dengan kapasitas besar. “Di Pulau Sumbawa itu bisa kita bangun *base load* sampai 4 giga, nantinya akan dibangun solar farm hingga 20 giga dan butuh 20 hektar lebih,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan hasil studi bersama akademisi dan ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menunjukkan prospek positif pengembangan ini. Dengan transmisi bawah laut, biaya listrik dari PLTS dapat bersaing dengan energi berbasis gas. “Itu bahkan masih *base load*, artinya ada storage yang menampung listrik ketika tidak digunakan karena tidak selalu matahari ada, jadi perlu disimpan jika produksinya berlebih,” jelasnya. **est/aha**



Pertimahan Harus Lebih Libatkan Masyarakat



Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, saat memimpin kunjungan reses Komisi XII di Gedung PT Timah Tbk, Pangkal Pinang, Kep. Bangka Belitung, Senin (11/8/2025).

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan komitmennya untuk mendorong tata kelola industri pertimahan yang lebih melibatkan masyarakat secara langsung. Hal ini disampaikan dalam kunjungan reses Komisi XII di Gedung PT Timah Tbk, Pangkal Pinang, Kep. Bangka Belitung yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan sektor pertambangan.

Menurutnya, tujuan utama pertemuan tersebut adalah mencari solusi agar industri timah di Bangka Belitung dapat pulih dan berkembang, sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya memberikan izin pertambangan rakyat (IPR) dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) sehingga aktivitas

penambangan oleh warga tidak lagi terjerat persoalan hukum.

“Pada dasarnya kita ingin bagaimana pertimahan ini



dapat kembali pulih. Kemudian pelaksanaan daripada pertambangan Timah nantinya dalam kata kelolanya lebih melibatkan masyarakat,” ujar Bambang dalam pertemuan yang berlangsung, Senin (11/8).

Ia juga mengapresiasi tagline baru PT Timah, “Timah untuk Rakyat” yang diharapkan menjadi dasar pelaksanaan operasi perusahaan. Politisi Partai Golkar itu mengusulkan pola kemitraan antara PT Timah, perusahaan swasta, dan penambang rakyat.

Ia mengatakan, jika aktivitas penambangan berada di area IUP (Izin Usaha Pertambangan) PT Timah, maka PT Timah diharapkan merangkul penambang dengan

Tujuan utama pertemuan tersebut adalah mencari solusi agar industri timah di Bangka Belitung dapat pulih dan berkembang, sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

memberikan Surat Perintah Kerja (SPK). Sementara itu, penambangan di IUP swasta dapat bermitra langsung dengan pemegang konsesi.

Konsep ini, kata Bambang, meniru pola kemitraan di sektor migas, di mana masyarakat yang melakukan pengeboran di konsesi Pertamina atau swasta difasilitasi secara legal. **—srw/aha**



Peningkatan Kerja Sama Indonesia-Selandia Baru

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera menegaskan ingin lebih meningkatkan hubungan bilateral yang lebih kuat lagi dengan Selandia Baru. Hal tersebut diungkapkannya usai menerima kunjungan Duta Besar Selandia Baru, Philip Nathan Taula dan *Deputy Chief of Mission* (DCM) Emma, di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/8).

“Kami ingin membangun hubungan bilateral yang lebih kuat dan mengajak Selandia Baru bersama Indonesia untuk mendorong kerja sama yang lebih produktif di kawasan Pasifik,” ujar Mardani kepada **Parlementaria** usai pertemuan.

Dijelaskannya ada tiga isu utama yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, yakni

penguatan hubungan bilateral Indonesia-Selandia Baru, dinamika hubungan dengan negara-negara di kawasan Pasifik, serta isu global seperti tarif perdagangan yang diberlakukan Donald Trump dan perubahan iklim.

“Kami juga membahas potensi kerja sama di tiga sektor utama. Pertama, sektor ekonomi, termasuk membuka pasar baru ke Pasifik di tengah tantangan perdagangan

global. Kedua, *people-to-people* seperti peluang beasiswa, pertukaran pelajar, dan budaya. Ketiga, komitmen bersama menjaga prinsip zona bebas senjata nuklir, yang sejalan dengan ASEAN,” tambahnya.

Tidak hanya itu, menurut Politisi dari Fraksi PKS ini, perubahan iklim juga menjadi sorotan khusus, terutama setelah pertemuan dengan perwakilan Fiji di forum IPP (*Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership*). Dimana Negara-negara Pasifik Selatan menekankan pentingnya aksi nyata, bukan sekedar perencanaan, karena wilayah mereka menjadi salah satu yang paling terdampak perubahan iklim.

Oleh karena itu, jika tidak aral melintang, Mardani mengungkapkan rencananya berkunjung ke Selandia Baru. Hal itu guna lebih mematangkan rencana peningkatan kerja sama demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara.

— ayu,ahk/rdn

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera.



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO: JKA/PDT



FOTO: JKA/PDT

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga dalam agenda BKSAP DPR RI bersama *Young Parliamentarians of AIPA* di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, (07/08/2025).

Dorong Standar Keberlanjutan Sawit

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga menekankan pentingnya penguatan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi tantangan perdagangan global, khususnya di sektor minyak nabati atau *crude palm oil* (CPO). Dalam pernyataannya, Ravindra menyoroti bahwa kedua negara kini telah mencatat nilai perdagangan bilateral yang mencapai 24 miliar dolar Amerika Serikat (USD), serta berperan sebagai produsen utama minyak nabati secara agregat di dunia.

“Kita adalah produsen minyak nabati terbesar secara agregat. Dan kita harus bersama-sama memikirkan bagaimana mekanisme agar sustainability standard kita diterima oleh beberapa negara, seperti Eropa dan kawasan dunia lainnya,” tegas Ravindra dalam agenda BKSAP DPR RI bersama *Young Parliamentarians of AIPA* di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, (07/08).

Isu keberlanjutan (*sustainability*) menjadi sorotan utama, mengingat negara-negara Uni Eropa dan sejumlah kawasan global kini menerapkan regulasi ketat terhadap produk-produk berbasis

sawit. Indonesia dan Malaysia, sebagai eksportir utama, dinilai perlu menyusun langkah kolektif agar standar keberlanjutan yang mereka miliki dapat diterima secara internasional dan tidak menjadi hambatan dagang.

Salah satu upaya konkret yang didorong adalah penguatan lembaga Indonesia-Malaysia *Council on Palm Oil*, sebagai forum bilateral yang bertujuan merumuskan dan menyelaraskan standar keberlanjutan industri sawit kedua negara.

Langkah ini juga dinilai sebagai bentuk diplomasi ekonomi yang proaktif di tengah dinamika kebijakan perdagangan internasional yang kerap menyudutkan komoditas strategis dari negara-negara berkembang. Melalui kolaborasi regional, Indonesia dan Malaysia diharapkan dapat memperkuat posisi tawar serta membuka peluang bagi harmonisasi standar global yang lebih adil bagi negara produsen.

fa/rdn



Agitator Informasi Publik Kinerja Dewan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menilai peningkatan keterampilan digital para pegawai, khususnya CPNS, menjadi penting, sehingga mampu menjadi agitator informasi publik yang efektif kinerja kedewanan. Penguasaan teknologi, kemampuan mengelola konten, dan kreativitas dalam penyajian informasi menjadi bekal utama dalam memperluas jangkauan pesan.

“Sekarang semua orang punya handphone dan perangkat digital. Tinggal bagaimana memanfaatkan itu untuk menyampaikan kinerja DPR secara menarik,” jelas Indra dalam acara Workshop Pengelolaan Sosial Media di Gedung Nusantara

II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/8).

Karena itu, ia menekankan perlunya memperkuat strategi komunikasi berbasis satu narasi multi-kanal atau multi-platform sebagai upaya membangun konsistensi pesan di seluruh kanal resmi lembaga DPR. Strategi ini, tambahnya, bertujuan memastikan isu dan pesan yang disampaikan DPR dapat menjangkau publik secara luas, seragam, dan menarik di setiap media, baik melalui situs web, media sosial, maupun kanal komunikasi internal.

Ia menilai tantangan terbesar menjaga konsistensi narasi lintas platform adalah komitmen kolektif. Menurutnya, semua pihak di DPR perlu melihat kanal komunikasi

lembaga sebagai satu kesatuan yang saling mendukung.

Di sisi lain, Indra juga akan melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja strategi komunikasi (Stratkom), baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Evaluasi ini bertujuan mengukur tidak hanya keluaran (*output*) dari setiap kanal komunikasi, tetapi juga hasil (*outcome*) yang dirasakan publik.

Ke depan, Indra berharap citra lembaga di media sosial dapat mencerminkan kinerja secara utuh. Ia menekankan bahwa publik seharusnya mendapatkan gambaran lengkap tentang program, capaian, dan manfaat kerja DPR, bukan hanya cuplikan isu yang muncul di permukaan. — **fa/rdn**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar dalam acara Workshop Pengelolaan Sosial Media di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/08/2025).

FOTO: AFR/PDT

Konsolidasikan Pengamanan Lintas Lembaga



Plt. Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI, Rudi Rochmansyah foto bersama usai menghadiri rapat koordinasi pengamanan lintas lembaga, mulai dari TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) di DPR, Jakarta, Senin (11/8/2025).

Ribuan tamu undangan dari dalam dan luar negeri, belasan ketua parlemen dunia, hingga para pejabat tinggi negara akan memadati Kompleks Parlemen Senayan pada Jumat 15 Agustus 2025 mendatang. Hal itu dalam rangka penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI serta Sidang Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026.

Demi memastikan momentum kenegaraan ini berjalan tanpa hambatan, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar koordinasi pengamanan lintas lembaga, mulai dari TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN). Plt. Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI, Rudi Rochmansyah, menyampaikan bahwa rapat

koordinasi pengamanan yang dipimpinnya merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang digelar pada 18 Agustus.

"Alhamdulillah, rapat hari ini dihadiri semua pihak yang kami undang. Ini menunjukkan keseriusan dan komitmen untuk bersinergi dan berkolaborasi demi kelancaran acara kenegaraan yang sangat penting ini," ujarnya kepada **Parlementaria** di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (11/8).

Rudi menegaskan bahwa skenario pengamanan telah disusun jauh hari untuk mendukung agenda yang juga terdapat Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya ini, termasuk antisipasi terhadap

kemungkinan meningkatnya jumlah tamu undangan tahun ini. Beberapa tamu kehormatan yang dijadwalkan hadir antara lain 12 ketua parlemen negara sahabat, para duta besar, serta penerima penghargaan teladan.

Selain itu, Setjen DPR RI akan mengeluarkan edaran khusus yang membatasi kehadiran pegawai pada hari pelaksanaan, 15 Agustus mendatang. Hanya unit kerja yang terkait langsung dengan kegiatan yang diwajibkan hadir, sedangkan lainnya akan menerapkan sistem *Work From Anywhere* (WFA). Kebijakan ini juga berlaku bagi pegawai DPD dan MPR guna meminimalisasi kepadatan di area kompleks. "Kami berharap pada tanggal 15 nanti, acara dapat berlangsung lancar, aman, tertib, dan nyaman bagi semua pihak," pungkas Rudi. **we/rdn**





Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto memimpin kunjungan kerja reses ke Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Oelpuah, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin (11/8/2025). Foto: est/aha





DOKUMENTER
INVESTIGASI
REFERENSI INDONESIA



TNR
PARLEMEN

TRANSFORMASI SUARA DAPIL
AKSI DEWAN
MENDENGAR - MELIHAT - MEMBANGUN

SAKSIKAN HANYA DI:

<https://tvrparlemen.dpr.go.id>



TVR PARLEMEN

EXECUTIVE PRODUCER **MEIDI NUGROHO**
PRODUCER **ADRIANUS SEPTIANTO** LINE PRODUCER **HERI HERYADI**



Sampaikan aspirasi Anda melalui
SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344



DPR RI



DPR RI



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri